

BAB IV

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama dalam perumusan visi misi pembangunan jangka menengah yang akan menentukan kinerja pembangunan lima tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang yaitu:

1. Permasalahan tata kelola pemerintahan, antara lain meliputi:
 - a. Belum maksimalnya capaian Standart Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar;
 - b. Belum terpenuhinya Rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan;
 - c. Masih tingginya ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat/provinsi;
 - d. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
 - e. Masih rendahnya pemanfaatan dokumen kajian sebagai pedoman penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan teknis;
 - f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan;
 - g. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu; dan
 - h. Belum tersedianya sistem pengelolaan arsip secara elektronik.
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain meliputi:
 - a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi terbarukan.

3. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kesejahteraan;
 - c. Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan perempuan serta perlindungan ibu dan anak; dan
 - d. Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial.
4. Permasalahan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi lokal, antara lain meliputi:
 - a. Belum tersedianya infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mewujudkan Boyolali *Smart City*;
 - b. Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan potensi wisata;
 - c. Masih rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - d. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM;
 - e. Masih kurangnya tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - f. Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran produk pertanian dan perikanan; dan
 - g. Belum tercukupinya ketersediaan sarpras perdagangan dan perindustrian pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan.
5. Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran, dan bencana alam;
6. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan:
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat berdemokrasi; dan
 - b. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM, dan penyakit masyarakat.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan kajian permasalahan, dinamika lingkungan strategis, dan analisa eksternal internal dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk ditangani dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

4.2.1. Isu Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

a. Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar

Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya, perlunya penambahan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian diperkotaan dan pedesaan, hal ini perlu upaya prioritas penyelesaiannya agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar desa antar kecamatan. Isu infrastruktur lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio kecukupan jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

b. Isu Strategi Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan Sosial

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali memerlukan ketersediaan peningkatan infrastruktur penunjang dan sosial berupa sarana transportasi, perhubungan, air bersih, energi. Antara lain melalui pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik dan infrastruktur penunjang lainnya. Pembebasan tanah untuk pembangunan aksesibilitas jalan baru juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. Kondisi lain yang perlu mendapatkan penanganan adalah infrastruktur energi, jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas masyarakat dan mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta menambah ketersediaan RTH untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia masyarakat Boyolali juga memerlukan pembangunan infrastruktur sosial antara lain infrastruktur pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan dan penunjang penyelesaian masalah sosial antara lain panti asuhan dan panti jompo.

c. Isu Strategis Penataan Ruang

Pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakat, pengembangan sarana prasarana transportasi umum (jalan tol dan

bandara) dan pengembangan kawasan kota di wilayah regional. Menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mengizinkan setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten Boyolali. Sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan penggunaan lahan secara efektif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.

Disamping itu untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperlukan penyediaan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi riil yang ada.

d. Isu Strategis Peningkatan Penyediaan Perumahan

Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

4.2.2. Isu Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Demokratis

a. Isu Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan Informasi

Transparansi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Pelayanan *E-government* menjadi kebutuhan bagi tata kelola pemerintahan, dan arsip daerah. Isu pendataan informasi pembangunan daerah dan penataan pengendalian ruang berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis akurasi data.

b. Isu Peningkatan Implementasi Regulasi, Standar Pelayanan dan Pemanfaatan Hasil Kajian.

Selama kurun 2016-2021, di Kabupaten Boyolali memerlukan ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat dan berbasis akurasi data serta diimplementasikan di setiap aspek pembangunan.

c. Isu Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggaran Negara

Perlu penyediaan regulasi kepegawaian (rekrutmen, penetapan, mutasi maupun promosi) supaya mendukung gerakan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan budaya kerja, serta kualitas pelayanan publik.

- d. Isu Peningkatan Kelembagaan, Tata Organisasi, dan Pendayagunaan Sumber Daya Organisasi Yang Efektif Dan Efisien.

Perlunya penyediaan regulasi sesuai dengan kebutuhan implementasinya terkait penataan organisasi perangkat daerah. Kebutuhan pengembangan organisasi pemerintah daerah mengikuti rasionalitas kebutuhan layanan. Apabila suatu perangkat daerah bertambah besar beban tuntutan pelayanannya, dimungkinkan adanya pemisahan organisasi atau pemekaran wilayah kerja pelayanan organisasi.

- e. Isu Peningkatan Kepastian Penegakan hukum dan Penghormatan HAM

Mengantisipasi dan melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM antara lain melalui revolusi mental dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan mendapatkan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial serta penegakan hukum sebagai upaya mencegah fenomena paham radikalisme berupa terorisme yang telah bertransformasi menjadi ancaman dan kekacauan wilayah, serta antisipasi terhadap peredaran narkoba yang mengancam produktivitas dan moralitas generasi muda.

- f. Isu Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan wajib dasar dan efisiensi belanja. Di samping itu juga dibutuhkan upaya untuk penertiban aset daerah dan juga transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

- g. Rasio pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik

Kecukupan sarana pemerintahan dan pelayanan publik sesuai rasio tuntutan kebutuhan pelayanan menjadi isu strategis karena mendukung pencapaian kinerja pelayanan publik prima. Oleh karena itu penambahan fasilitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik perlu menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

4.2.3. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah

- a. Isu Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Dunia Privat Bersifat Strategis.

KAD dapat dijadikan sarana untuk menyerasikan dan mensinergikan potensi antar daerah. Kerjasama antar daerah dan

kerjasama dengan dunia usaha berperan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal, pemecahan masalah lingkungan dan sumber daya publik, seperti persampahan dan air Isu Peningkatan Derajat Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Demokrasi.

b. Isu kondusivitas daerah

Isu ini mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib, aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan menciptakan kondisi kota yang ramah investor, sehingga meningkatkan daya saing daerah.

c. Isu Daya Saing Daerah dari Sumber Daya Manusia

Isu-isu dari bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan *gender* dan pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah.

d. Isu Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata

Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang memadai akan membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan daerah meliputi sektor pertanian, perikanan, Industri kecil menengah (IKM), dan pariwisata sekaligus membuka peluang investasi di bidang industri.

e. Isu Pengembangan Dunia Usaha.

Isu pengembangan dunia usaha berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, kreativitas, kualitas dan kuantitas produk dari pelaku usaha khususnya UMKM dalam memasuki era persaingan global antara lain diberlakukannya Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2016.

f. Isu Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya

Pariwisata menjadi dimensi prioritas pembangunan sektor unggulan di RPJMN Tahun 2015-2019. Pariwisata juga menjadi isu strategi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan menjadi prioritas arah pengembangan potensi wilayah di Jawa Tengah. Tantangan bagi Kabupaten Boyolali adalah memadukan tantangan nasional dan tantangan Provinsi Jawa Tengah di bidang pariwisata dengan misi Bupati

terpilih Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dari analisis isu yang dilakukan, tantangan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali adalah mengembangkan industri pariwisata berbasis pengembangan hasil pertanian dan berwawasan keberlanjutan lingkungan atau pengembangan pariwisata hijau. Pengembangan agrowisata dan atau agropolitan menjadi isu strategis. Selain itu juga pengembangan pariwisata berbasis seni budaya. Pengembangan seni budaya selain bermakna sebagai potensi wisata, juga berfungsi melestarikan nilai-nilai jati diri sebagai komunitas yang mewarisi tata nilai adat khusus dari nenek moyang bangsa. Isu strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis nilai seni budaya adalah memasyarakatkan di kalangan generasi muda kebanggaan jati diri sebagai pewaris nilai-nilai adat budaya nenek moyang dan mengemas pemasarannya secara tepat di tengah arus komodifikasi nilai-nilai budaya luar.

Potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali yang perlu dikembangkan adalah pelestarian situs warisan budaya dan bangunan cagar budaya, termasuk peninggalan sejarah dan situs-situs wisata religi.

4.2.4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Daerah, sebagai representasi negara, merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah dapat menggandeng swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan.

a. Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga

Isu kemiskinan, jaminan dan bantuan ekonomi bagi kelompok miskin, pemenuhan kebutuhan papan, meliputi isu kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, alih fungsi lahan, rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur menantang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di Kabupaten Boyolali untuk memperluas cakupan peserta Keluarga Berencana dan kesehatan seksual dan reproduksi, menuju keluarga sejahtera.

Isu Derajat Kesehatan, yang krusial adalah (i) Pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), (ii) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru dan HIV/AIDS), (iii) Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; (iv) Optimalisasi pelayanan RSUD dengan model BLUD.

Isu Pendidikan, implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 (dua belas) tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal, Pendidikan PAUD, Kualitas tenaga pendidik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan.

Isu Perempuan dan Anak, dibutuhkan upaya (i) Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik; (ii) Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan melalui sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial terpadu, sebagai bagian meningkatkan kesejahteraan keluarga, melibatkan *collaborative* dan koordinasi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat.

b. Isu Ketahanan Pangan dan Energi

Isu Ketahanan Pangan dan Energi, tantangannya bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan. Isu alih fungsi lahan pertanian, produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan darat, ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan darat berbasis teknologi tepat guna.

c. Ketenagakerjaan, Penurunan Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.

Isu ketenagakerjaan, tantangannya mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka. Peningkatan kerjasama antar daerah dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan transmigran.

4.2.5. Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi *Green Economy*

Permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya laju populasi manusia. Pertumbuhan penduduk kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan dan peningkatan kebutuhan energi berimplikasi pada pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.

a. Isu Peningkatan Tanggap Bencana

Isu perlindungan masyarakat dari ancaman bencana merupakan wujud pemenuhan hak. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Fokus tidak hanya menangani bencana, namun juga mitigasi bencana keseluruhan manajemen resiko yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Perlunya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

b. Isu Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Perlu penegakan regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil sumber daya alam meliputi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan lindung, pertambangan bukan logam dan batuan dengan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Isu industri kreatif ramah lingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

c. Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah, tata guna lahan, penataan wilayah, dan kebijakan tata kelola kebersihan serta kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu kemerosotan pkeanekaragaman hayati, meningkatnya luasan lahan kritis, ketersediaan sumber air baku menurun, dan menurunnya kualitas sumber daya air bersih, sampah, RTH, limbah industri, sanitasi bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim dan bagaimana memenuhi RTH Kota sesuai persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, mewujudkan pengurangan pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan penanganan sampah sebagai upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi.